

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LAGU SITI MAWARNI MELALUI PENDEKATAN MASLAHAH MURSALAH DAN KRITIK SOSIAL

Debby Triana Dewi¹, Rahmi Nur Azizah², Septiara Nur Habibah³, Amas
Muda⁴, Melhadi⁵



*Correspondence :

Email :
dbytrianadewi@gmail.com

Affiliation:

1,2,3,4, 5, Universitas Islam
Negeri Mahmud
Yunus
Batusangkar

Article History :

Submission : 12 April 2026
Revised : 5 June 2026
Accepted : 18 June
Published : 30 June 2026

Keyword : Maslahah
Mursalah, Social
Criticism, Viral Song,
Islamic Law, Narcotics

Abstract

This study aims to analyze the viral phenomenon of the song "Siti Mawarni" as a form of social criticism toward injustice and inequality in law enforcement, particularly in narcotics cases, from an Islamic law perspective. The background of this research lies in the shift of public expression from formal channels to popular media such as music, reflecting declining public trust in formal control mechanisms. The novelty of this study is the application of the maslahah mursalah approach to examine popular artistic expressions as a medium of social criticism, which remains underexplored in Islamic legal studies. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach through library research and digital phenomenon analysis. The findings indicate that the criticism conveyed in the song holds elements of public benefit (maslahah), as it raises awareness and demands justice, particularly regarding disparities between minor offenders and major drug traffickers. However, it also carries the potential for harm (mafsadah) if expressed unethically. Therefore, artistic criticism is permissible in Islamic law as long as it aligns with public interest and avoids social harm.

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena viralitas lagu "Siti Mawarni" sebagai bentuk kritik sosial terhadap ketidakadilan dan ketimpangan penegakan hukum, khususnya dalam kasus narkoba, dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah pergeseran cara masyarakat dalam menyampaikan kritik dari jalur formal ke media populer seperti musik, yang mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap mekanisme kontrol formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *maslahah mursalah* untuk mengkaji karya seni populer sebagai media kritik sosial, yang masih jarang dibahas dalam kajian hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan dan analisis fenomena digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik dalam lagu tersebut memiliki nilai kemaslahatan karena mendorong kesadaran publik dan tuntutan keadilan, terutama terkait ketimpangan antara penindasan pengguna dan bandar narkoba. Namun, kritik tersebut juga berpotensi menimbulkan mafsadah jika tidak disampaikan secara etis. Dengan demikian, lagu sebagai media kritik dapat diterima dalam hukum Islam selama sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat kontemporer menunjukkan adanya transformasi dalam cara menyampaikan kritik sosial, terutama dengan hadirnya media digital yang memperluas ruang ekspresi publik. Kritik yang dahulu disampaikan melalui forum formal kini beralih ke medium yang lebih populer, seperti musik, video, dan konten digital lainnya. Fenomena ini menandai perubahan pola komunikasi sosial, di mana masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi formal dalam menyuarakan aspirasi, melainkan memanfaatkan ruang-ruang alternatif yang lebih inklusif dan mudah diakses (Hasbi Ash-Shiddieqy. 2020).

Salah satu fenomena yang mencerminkan hal tersebut adalah viralnya lagu “Siti Mawarni”, yang berkembang luas di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan publik. Lagu ini tidak hanya dipahami sebagai karya seni, tetapi juga sebagai representasi simbolik dari kegelisahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Narasi yang terkandung di dalamnya mencerminkan kritik terhadap kondisi ketidakadilan serta dugaan ketimpangan dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus sosial seperti narkoba.

Fenomena viralitas lagu “Siti Mawarni” juga dapat dilihat dari tingginya tingkat keterlibatan (*engagement*) masyarakat di berbagai platform media sosial. Sejak pertama kali beredar pada April 2026, lagu ini telah dibagikan ulang oleh banyak akun TikTok, Instagram, Facebook, dan Threads serta memperoleh puluhan ribu hingga ratusan ribu tayangan dalam waktu singkat. Salah satu unggahan yang menggunakan lagu tersebut di TikTok tercatat telah ditonton lebih dari 93 ribu kali, sementara berbagai unggahan ulang lainnya memperoleh ribuan komentar dan respons dari warganet. Selain menjadi tren di media sosial, nama “Siti Mawarni” juga sempat masuk dalam daftar pencarian populer Google Trends pada akhir April 2026. Tingginya angka tayangan dan interaksi tersebut menunjukkan bahwa lagu ini tidak hanya diterima sebagai karya hiburan, tetapi juga sebagai media kritik sosial yang berhasil menarik perhatian publik terhadap isu peredaran narkoba dan ketimpangan penegakan hukum di Sumatera Utara.

Fenomena ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan berkelindan dengan pengalaman sosial masyarakat yang telah berlangsung cukup lama. Dalam berbagai kasus, terdapat persepsi bahwa sebagian pihak menjadi korban dari sistem yang tidak sepenuhnya adil, sementara aktor-aktor dengan kekuasaan justru sulit dijangkau oleh hukum. Kondisi ini memunculkan akumulasi kekecewaan publik yang kemudian menemukan salurannya melalui karya-karya budaya populer, termasuk lagu tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, realitas sosial seperti ini dapat dianalisis melalui pendekatan *masalah mursalah*, yaitu prinsip penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari’ah*). Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk fenomena kritik sosial dalam bentuk karya seni.

Menurut al-Syathibi, tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah) adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid) bagi manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (al-daruriyyat al-khams), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam kerangka ini, masalah mursalah dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkannya ataupun melarangnya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (Jasser Auda. 2021). Oleh karena itu, masalah mursalah dapat dijadikan dasar dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, selama bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis kritik sosial dalam lagu "Siti Mawarni", karena fenomena tersebut berkaitan dengan upaya mendorong keadilan sosial, perlindungan masyarakat dari dampak narkoba, serta penguatan fungsi kontrol sosial yang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *masalah mursalah* telah banyak digunakan dalam merespons isu-isu kontemporer, seperti kebijakan publik, keadilan sosial pendidikan, dan perlindungan hak masyarakat (Iqbal and Mirza 2024; Mukhlis n.d.; Prayoga et al. 2023). Selain itu, kajian mengenai kritik sosial dalam Islam juga menekankan pentingnya prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat (Aziza and Ramadhania 2025; Wardana and Paralian n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi kritik selama dilakukan dalam koridor etika dan kemaslahatan.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek normatif dan kebijakan formal, serta belum banyak menyentuh analisis terhadap karya seni populer sebagai media kritik sosial. Padahal, dalam konteks masyarakat modern, karya seni memiliki peran strategis sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan sosial. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji fenomena ini secara lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji viralitas lagu sebagai bentuk kritik sosial dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah*. Fenomena lagu "Siti Mawarni" menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan adanya resonansi kolektif masyarakat terhadap isu keadilan, serta menunjukkan pergeseran dari kritik individual menuju kritik sistemik terhadap struktur sosial dan hukum.

Lebih lanjut, fenomena ini juga mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme kontrol formal kenegaraan. Ketika saluran formal dianggap kurang efektif, masyarakat cenderung mencari alternatif lain untuk mengekspresikan aspirasi dan kritiknya. Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana bentuk ekspresi tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya yang membawa kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lagu “Siti Mawarni” dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *masalah mursalah*, serta mengkaji relevansinya sebagai bentuk kritik sosial yang mencerminkan kepentingan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memahami hubungan antara ekspresi budaya, kritik sosial, dan prinsip-prinsip kemaslahatan.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji fenomena sosial berupa viralitas lagu “Siti Mawarni” sebagai objek analisis dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep *masalah mursalah* dan prinsip-prinsip *maqashid al-shari’ah* yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta metode penelitian tersebut adalah sumber-sumber kajian hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami konteks sosial, resepsi publik, dan makna kritik sosial yang berkembang di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa lirik lagu, narasi yang berkembang di ruang publik, serta fenomena viralitasnya di media sosial, dan data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir, serta dokumen terkait yang relevan dengan kajian hukum Islam dan kritik sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi terhadap fenomena digital yang berkaitan. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis dengan cara menguraikan fenomena secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan kerangka *masalah mursalah* untuk menilai apakah kritik sosial yang terkandung dalam lagu tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah. Mekanisme analisis syariah dilakukan dengan mengidentifikasi nilai-nilai kemaslahatan yang muncul, mengukur relevansinya terhadap tujuan syariat, serta membandingkannya dengan kaidah-kaidah fikih yang berlaku, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai posisi fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

HASIL

Bagian ini menguraikan temuan penelitian yang berfokus pada fenomena viralitas lagu “Siti Mawarni” sebagai refleksi dinamika sosial masyarakat kontemporer, khususnya dalam konteks kritik terhadap ketidakadilan dan lemahnya kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Pembahasan ini tidak hanya menempatkan lagu sebagai karya seni, tetapi juga sebagai medium komunikasi sosial yang sarat makna dan nilai kritik. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, analisis dilakukan dengan mengaitkan fenomena tersebut dengan perspektif hukum Islam melalui pendekatan *masalah mursalah*, serta meninjau relevansinya dengan konsep *amar ma’ruf nahi munkar* sebagai landasan normatif kritik sosial dalam Islam (Santoso et al. 2026). Selain itu, kajian ini juga menyoroti aspek kemaslahatan dan potensi mafsadah yang muncul dari ekspresi kritik melalui

karya seni, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi fenomena ini dalam kerangka hukum Islam kontemporer.

1. Fenomena Viralitas Lagu “Siti Mawarni” sebagai Representasi Kegelisahan Sosial

Fenomena viralitas lagu “Siti Mawarni” tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melatarbelakanginya. Lagu ini muncul di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kegelisahan akibat berbagai persoalan sosial, seperti ketidakadilan hukum, ketimpangan kekuasaan, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Viralitasnya menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut memiliki relevansi kuat dengan realitas yang dirasakan oleh banyak orang, sehingga dengan cepat menyebar dan diterima secara luas di ruang publik digital (Iqbal and Mirza 2024).

Kegelisahan sosial yang direpresentasikan dalam lagu ini bersifat kolektif, bukan sekadar pengalaman individual. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat merespons lagu tersebut dengan mengaitkannya pada berbagai kasus nyata yang mereka anggap tidak adil. Dengan demikian, lagu “Siti Mawarni” berfungsi sebagai medium yang menyatukan berbagai pengalaman sosial yang terfragmentasi menjadi satu narasi bersama tentang ketidakpuasan terhadap sistem yang ada.

Viralitas lagu ini juga mencerminkan adanya perubahan pola komunikasi masyarakat. Jika sebelumnya kritik sosial lebih banyak disampaikan melalui jalur formal atau institusional, kini masyarakat cenderung menggunakan media populer seperti musik untuk menyampaikan aspirasi mereka (Abdullah, Amin. 2020). Hal ini menunjukkan bahwa karya seni memiliki peran strategis sebagai sarana komunikasi alternatif yang mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Selain itu, keberhasilan lagu ini menjadi viral juga didukung oleh karakteristik media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif. Platform media sosial berperan sebagai katalis yang mempercepat proses viralitas, sehingga pesan yang terkandung dalam lagu dapat dengan mudah diakses, dibagikan, dan didiskusikan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, viralitas tidak hanya menunjukkan popularitas, tetapi juga mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan kegelisahan mereka secara kolektif.

Fenomena ini juga dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan saluran formal dalam menampung aspirasi publik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak cukup didengar melalui mekanisme resmi, mereka mencari alternatif lain yang lebih efektif dan bebas. Lagu “Siti Mawarni” menjadi salah satu bentuk ekspresi tersebut, di mana kritik sosial disampaikan secara simbolik namun tetap memiliki daya tekan yang kuat terhadap realitas yang dikritik (Al-Yasa', Abu Bakar. 2021).

Dengan demikian, viralitas lagu “Siti Mawarni” bukan sekadar fenomena budaya populer, melainkan representasi dari kondisi sosial yang lebih dalam. Lagu ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap sistem yang dianggap tidak sepenuhnya adil, sekaligus menjadi sarana untuk menyuarakan kritik secara kolektif. Oleh karena itu, fenomena ini penting

untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam perspektif hukum Islam, guna memahami sejauh mana ekspresi semacam ini dapat dikategorikan sebagai upaya yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Lagu sebagai Media Kritik Sistemik terhadap Ketidakadilan Sosial

Lagu sebagai media ekspresi tidak lagi terbatas pada fungsi hiburan, melainkan telah berkembang menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif dalam menyampaikan kritik terhadap realitas yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks lagu “Siti Mawarni”, karya ini mencerminkan bagaimana musik mampu menjadi wadah artikulasi keresahan publik terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dirasakan secara kolektif. Pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat personal, tetapi menggambarkan pengalaman sosial yang lebih luas dan terstruktur (Anshori, Abdul Ghofur. 2020).

Kritik yang disampaikan melalui lagu ini dapat dikategorikan sebagai kritik sistemik, yaitu kritik yang tidak hanya menyoroti perilaku individu, tetapi juga mengarah pada kelemahan struktur dan mekanisme dalam sistem sosial maupun hukum. Hal ini terlihat dari narasi yang berkembang di masyarakat, di mana ketidakadilan tidak lagi dipahami sebagai kasus sporadis, melainkan sebagai bagian dari persoalan yang lebih kompleks dan berulang. Dengan demikian, lagu tersebut berfungsi sebagai refleksi atas realitas sosial yang dianggap belum sepenuhnya menghadirkan keadilan.

Untuk memperkuat legitimasi kritik terhadap ketidakadilan dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 135:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan*

Dari terjemahan ayat diatas menegaskan pentingnya menegakkan keadilan secara tegas, bahkan terhadap diri sendiri atau kelompok terdekat. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun. Dengan demikian, kritik terhadap ketidakadilan termasuk yang disampaikan melalui karya seni seperti lagu “Siti Mawarni” dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan nilai keadilan yang diperintahkan dalam Islam. Selama kritik tersebut bertujuan untuk meluruskan penyimpangan dan tidak melanggar batas etika, maka ia memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam sebagai bentuk kepedulian terhadap terciptanya tatanan sosial yang adil.

Dalam masyarakat modern, karya seni seperti lagu memiliki kekuatan simbolik yang mampu membangun kesadaran kolektif. Melalui lirik, nada, dan penyebaran digital, pesan kritik dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini menjadikan lagu sebagai medium yang efektif dalam membentuk opini publik sekaligus memperkuat solidaritas sosial di antara mereka yang memiliki pengalaman serupa terhadap ketidakadilan (Prayoga *et al.* 2023).

Penggunaan lagu sebagai media kritik juga menunjukkan adanya pergeseran cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ketika saluran formal dianggap kurang responsif atau terbatas, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih bebas dan ekspresif. Dalam hal ini, lagu menjadi ruang alternatif yang memungkinkan penyampaian kritik secara lebih luas tanpa harus terikat pada prosedur formal yang kaku.

Dari perspektif sosial, fenomena ini juga memperlihatkan adanya akumulasi kekecewaan yang kemudian menemukan momentumnya melalui viralitas sebuah karya. Lagu “Siti Mawarni” tidak hanya menjadi populer karena unsur musikalitasnya, tetapi karena kemampuannya merepresentasikan realitas yang dirasakan banyak orang. Dengan kata lain, viralitas tersebut merupakan bentuk resonansi kolektif yang memperkuat pesan kritik yang terkandung di dalamnya (Asmuni. 2021).

Namun demikian, penggunaan lagu sebagai media kritik sistemik juga perlu dipahami secara proporsional. Kritik yang disampaikan harus tetap berada dalam koridor etika dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam menyampaikan kritik.

Dengan demikian, lagu sebagai media kritik sistemik terhadap ketidakadilan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesadaran publik dan mendorong perubahan sosial. Dalam konteks ini, lagu “Siti Mawarni” dapat dipahami sebagai representasi dari suara masyarakat yang menginginkan keadilan, sekaligus sebagai pengingat bahwa kritik sosial merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

3. Krisis Kepercayaan Publik terhadap Mekanisme Penegakan Hukum

Lagu dalam konteks masyarakat modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi telah berkembang menjadi sarana penyampaian pesan sosial yang efektif. Melalui lirik, nada, dan penyebarannya di ruang digital, sebuah lagu mampu merepresentasikan realitas yang dirasakan masyarakat. Dalam hal ini, lagu dapat menjadi medium artikulasi suara publik yang sebelumnya sulit disampaikan melalui jalur formal, sehingga menjadikannya sebagai instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif (Azra, Azyumardi. 2021).

Sebagai bentuk ekspresi, lagu juga memiliki kekuatan untuk mengangkat isu-isu ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Kritik yang disampaikan tidak lagi bersifat personal atau terbatas pada individu

tertentu, melainkan mengarah pada sistem yang lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari kritik yang bersifat parsial menuju kritik yang lebih struktural, di mana permasalahan dipahami sebagai bagian dari kegagalan sistem dalam menciptakan keadilan.

Dalam konteks krisis kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum, perbandingan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (realitas yang terjadi) menjadi sangat relevan. Secara normatif, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menjamin penegakan hukum yang tegas, adil, dan menyeluruh terhadap seluruh pelaku kejahatan narkotika, baik pengguna, pengedar, maupun bandar besar (Arianti and Pertiwi 2018). Namun, dalam realitas sosial yang berkembang, sering muncul persepsi adanya ketimpangan dalam penerapannya, di mana pelaku kecil lebih mudah diproses hukum, sementara aktor besar yang memiliki jaringan dan kekuatan tertentu cenderung sulit dijangkau. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik ini memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang kemudian diekspresikan melalui berbagai bentuk kritik sosial, termasuk melalui karya seni seperti lagu.

Selain itu, penyampaian kritik melalui lagu cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dikemas dalam bentuk yang komunikatif dan emosional. Musik mampu menyentuh aspek perasaan sekaligus rasionalitas pendengar, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan membekas. Dalam situasi tertentu, lagu bahkan dapat menjadi simbol perlawanan terhadap kondisi yang dianggap tidak adil, serta menjadi representasi dari aspirasi kelompok masyarakat tertentu (Dahlan, Abdul Aziz. 2020)

Namun demikian, kritik sistemik yang disampaikan melalui karya seni tetap memerlukan batasan etis agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam perspektif sosial, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan tidak memicu konflik baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kritik tersebut disampaikan, apakah bertujuan untuk memperbaiki keadaan atau justru memperkeruh situasi yang ada.

Dalam kerangka hukum Islam, fenomena ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menyuarakan kebenaran dan menolak ketidakadilan, yang pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat. Namun, penilaiannya tetap harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari potensi kerusakan. Dengan demikian, lagu sebagai media kritik sistemik dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi sosial yang sah, selama tetap berada dalam koridor etika dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

4. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Kritik Sosial Perspektif Islam

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan kewajiban moral umat untuk menyeru kepada kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*munkar*). Prinsip ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki

dimensi sosial yang kuat, karena bertujuan menjaga keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dari arti terjemahan ayat diatas yang menegaskan pentingnya adanya sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks ini, setiap bentuk penyimpangan yang merugikan publik, termasuk praktik kejahatan terorganisir seperti peredaran narkoba, masuk dalam kategori *munkar* yang harus dicegah.

Dan terdapt juga dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ

أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya (kekuasaan/fisik). Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. (HR. Muslim)

Dalam perspektif kritik sosial, amar ma'ruf nahi munkar dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk melalui media ekspresi budaya seperti lagu. Kritik yang disampaikan tidak selalu harus dalam bentuk formal atau institusional, melainkan dapat hadir melalui simbol, narasi, dan representasi artistik yang mampu menjangkau kesadaran publik secara lebih luas. Lagu "Siti Mawarni" dapat dipahami sebagai salah satu bentuk artikulasi kritik tersebut, di mana pesan yang disampaikan mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari nilai keadilan (Hallaq, Wael B. 2021)

Kaitannya dengan isu bandar narkoba, lirik dalam lagu tersebut secara implisit menyinggung adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pelaku-pelaku besar yang memiliki kekuasaan atau jaringan kuat kerap luput dari jeratan hukum, sementara pihak yang lebih lemah justru menjadi sasaran utama. Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) yang menjadi tujuan utama syariat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum justru memperbesar ruang kemungkaran, karena tidak adanya efek jera bagi pelaku utama kejahatan (Irpan1, Zainuddin2 n.d.).

Melalui pendekatan amar ma'ruf nahi munkar, kritik terhadap fenomena tersebut dapat dipandang sebagai bentuk upaya kolektif untuk mengingatkan dan meluruskan praktik yang menyimpang. Namun demikian, Islam juga menekankan bahwa cara penyampaian kritik harus tetap berada dalam koridor etika, seperti tidak mengandung fitnah, tidak merusak kehormatan individu tanpa dasar yang jelas, serta bertujuan untuk perbaikan, bukan sekadar pelampiasan emosi. Dengan demikian, kritik yang

disampaikan melalui lagu perlu dianalisis apakah benar-benar membawa nilai kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mudarat baru.

Lebih jauh, fenomena kritik terhadap bandar narkoba dan dugaan keterlibatan oknum tertentu menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan transparansi dan keadilan yang lebih substantif. Dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap struktur kekuasaan. Ketika mekanisme formal dianggap tidak efektif, maka ekspresi alternatif seperti karya seni menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut perubahan yang lebih adil (Harahap, M. Yahya. 2020).

Dengan demikian, lagu "Siti Mawarni" dapat diposisikan sebagai refleksi dari praktik amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks modern, khususnya dalam bentuk kritik sosial terhadap ketidakadilan sistemik dan peredaran narkoba. Selama kritik tersebut diarahkan untuk menegakkan nilai keadilan, mendorong perbaikan, dan tidak melanggar prinsip etika Islam, maka ia dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sosial. Sebaliknya, jika kritik tersebut mengarah pada penyebaran informasi yang tidak benar atau merusak tatanan sosial, maka perlu dilakukan evaluasi agar tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam.

5. Pendekatan Masalah Mursalah dalam Menilai Kritik Sosial Kontemporer

Pendekatan masalah mursalah dalam menilai kritik sosial kontemporer berangkat dari pemahaman bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial. Kritik sosial yang muncul melalui karya seperti lagu "Siti Mawarni" dapat dipahami sebagai refleksi kebutuhan masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan. Dalam konteks ini, masalah mursalah menjadi instrumen penting untuk menilai apakah kritik tersebut membawa kemaslahatan umum atau justru berpotensi menimbulkan kerusakan (mafsadah). Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada bentuk ekspresi, tetapi pada dampak sosial yang dihasilkannya (Waldi, Dalil, and Arianti 2025).

Dari sisi masalah, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan dasar penilaian. Pertama, masalah dalam menjaga keadilan (*hifz al-'adl*), yaitu bagaimana kritik sosial mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil, terutama dalam kasus narkoba yang sering dianggap timpang antara pengguna dan bandar. Kedua, masalah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), di mana kritik terhadap sistem diharapkan dapat mengurangi dampak buruk narkoba terhadap masyarakat. Ketiga, masalah dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*), yang berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat dari kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba. Keempat, masalah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), terutama dalam konteks praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Kelima, masalah dalam menjaga tatanan sosial (*hifz al-nizam*) (Arianti et al. 2025), yaitu memastikan bahwa kritik yang disampaikan dapat memperbaiki sistem, bukan merusaknya.

Sementara itu, dari sisi mursalah, terdapat karakteristik yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak adanya dalil spesifik (*la nash fih*), artinya

fenomena kritik melalui lagu tidak secara eksplisit diatur dalam teks syariat, namun tetap dapat dianalisis melalui prinsip umum. Kedua, bersifat umum dan kolektif (*kulliyyah*), yaitu kritik tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan individu semata. Ketiga, sejalan dengan tujuan syariat (*mulā'im li maqāsid al-sharī'ah*), yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan dan kebenaran. Keempat, bersifat rasional dan kontekstual (*ma'qūlah*), sehingga dapat diterima akal sehat dalam menjawab persoalan sosial yang berkembang. Kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang pasti, sehingga tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan inti lagu "Siti Mawarni", kritik yang disampaikan mencerminkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, khususnya antara pengguna narkoba yang sering menjadi objek penindakan dengan bandar atau aktor besar yang sulit dijangkau. Dalam perspektif masalah, kritik ini dapat dipandang sebagai upaya mendorong keadilan dan perlindungan masyarakat, sehingga memiliki nilai kemaslahatan. Lagu tersebut menjadi media untuk menyuarakan realitas sosial yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus mendorong perbaikan sistem hukum agar lebih adil dan transparan.

Namun demikian, pendekatan masalah mursalah juga menuntut kehati-hatian dalam menilai potensi mafsadah. Kritik yang disampaikan harus tetap berada dalam batas etika, tidak mengandung fitnah, provokasi, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika kritik disampaikan secara berlebihan atau tanpa dasar yang jelas, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap institusi negara dan berpotensi merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral menjadi hal yang penting (Latief *et al.* 2022).

Dengan demikian, pendekatan masalah mursalah memberikan kerangka yang komprehensif dalam menilai kritik sosial kontemporer, termasuk yang disampaikan melalui karya seni seperti lagu "Siti Mawarni". Selama kritik tersebut bertujuan untuk mendorong keadilan, melindungi masyarakat, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat, maka ia dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan. Sebaliknya, jika menimbulkan kerusakan atau bertentangan dengan prinsip dasar Islam, maka perlu dilakukan pembatasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons fenomena sosial, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai etika dan keadilan.

6. Analisis Kemaslahatan dan Mafsadah dalam Ekspresi Kritik melalui Karya Seni

Analisis kemaslahatan (masalah) dan kerusakan (mafsadah) dalam ekspresi kritik melalui karya seni menjadi penting dalam melihat bagaimana pesan sosial disampaikan kepada publik. Karya seni seperti lagu "Siti Mawarni" tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium artikulasi kegelisahan masyarakat terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam melalui pendekatan masalah mursalah memberikan ruang

untuk menilai apakah ekspresi tersebut membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat atau justru menimbulkan dampak negatif.

Dari sisi kemaslahatan, kritik sosial melalui karya seni dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap ketidakadilan. Dalam kasus peredaran narkoba, khususnya yang sering dikaitkan dengan keberadaan bandar besar di wilayah Sumatera Utara, masyarakat kerap melihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum (Alydrus, Suhadi, and Lutfitasari 2020). Pengguna atau pelaku kecil lebih mudah ditindak, sementara jaringan besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan relasi kekuasaan cenderung sulit disentuh. Kritik melalui lagu dapat membuka ruang diskusi publik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Selain itu, kemaslahatan juga terlihat dalam fungsi kontrol sosial. Dalam Islam, kritik yang konstruktif merupakan bagian dari upaya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika masyarakat menyuarakan ketidakadilan melalui karya seni, hal tersebut dapat menjadi tekanan moral bagi aparat dan pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem. Dalam konteks ini, karya seni berperan sebagai jembatan antara realitas sosial dan harapan akan keadilan yang lebih baik.

Namun demikian, terdapat pula potensi mafsadah yang perlu diperhatikan. Kritik yang disampaikan melalui karya seni berisiko menimbulkan generalisasi negatif terhadap institusi penegak hukum, terutama jika tidak didasarkan pada data yang akurat. Hal ini dapat memperburuk tingkat kepercayaan publik dan menciptakan stigma yang merugikan pihak-pihak yang sebenarnya menjalankan tugas secara profesional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kritik tetap berada dalam koridor etika dan tidak mengarah pada fitnah atau provokasi.

Potensi mafsadah lainnya adalah munculnya rasa apatis di kalangan masyarakat. Ketika kritik terhadap ketimpangan hukum terus disuarakan tanpa diikuti dengan perubahan nyata, masyarakat dapat kehilangan harapan terhadap sistem hukum yang ada. Kondisi ini berbahaya karena dapat mendorong munculnya sikap ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pada akhirnya justru merusak tatanan sosial secara lebih luas.

Dalam konteks Sumatera Utara, isu tentang bandar narkoba yang sulit disentuh hukum sering menjadi perbincangan publik. Jika benar terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum, maka hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Dalam perspektif masalah, kondisi tersebut jelas bertentangan dengan tujuan syariat yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap jiwa serta akal manusia dari bahaya narkoba.

Karya seni seperti lagu "Siti Mawarni" dapat dipahami sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut. Ia menjadi simbol perlawanan moral terhadap ketidakadilan dan sekaligus media untuk menyuarakan harapan akan perubahan. Selama kritik yang disampaikan bertujuan untuk memperbaiki sistem dan melindungi kepentingan masyarakat luas, maka hal

tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip hukum Islam (Bramuda Pramesti Kusumaningtyas1 2025).

Dengan demikian, analisis kemaslahatan dan mafsadah dalam ekspresi kritik melalui karya seni harus dilakukan secara seimbang. Kritik terhadap ketimpangan penegakan hukum, termasuk dalam kasus bandar narkoba di Sumatera Utara, memiliki nilai positif jika mendorong keadilan dan perlindungan masyarakat. Namun, potensi dampak negatif juga harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, kebebasan berekspresi tetap harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan tujuan kemaslahatan bersama.

PEMBAHASAN

Diskusi dalam penelitian ini berangkat dari upaya menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kritik sosial dalam karya seni, khususnya lagu “Siti Mawarni”, dapat dianalisis melalui pendekatan *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa lirik dan narasi yang berkembang tidak sekadar menjadi ekspresi emosional, melainkan refleksi dari keresahan masyarakat terhadap ketimpangan penegakan hukum, terutama dalam kasus peredaran narkoba. Dengan demikian, kritik yang disampaikan memiliki dimensi sosial yang kuat dan relevan untuk dianalisis secara normatif.

Proses diperolehnya temuan didasarkan pada analisis terhadap makna simbolik dalam lirik lagu serta keterkaitannya dengan realitas sosial yang berkembang, khususnya isu maraknya bandar narkoba di Sumatera Utara. Dalam berbagai wacana publik, sering muncul anggapan bahwa aparat lebih tegas terhadap pengguna atau pelaku kecil, sementara aktor besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan luas cenderung sulit disentuh hukum. Pola ini memperkuat persepsi ketidakadilan yang kemudian direfleksikan dalam karya seni.

Penafsiran terhadap temuan menunjukkan bahwa lagu tersebut berfungsi sebagai medium artikulasi kritik sistemik. Jika sebelumnya kritik lebih bersifat individual, kini bergeser menjadi kritik terhadap struktur dan mekanisme hukum itu sendiri. Dalam perspektif *masalah*, kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan yang lebih merata. Kritik yang muncul bukan semata-mata bentuk perlawanan, tetapi juga harapan akan perbaikan sistem.

Temuan ini dapat dihubungkan dengan struktur teori hukum Islam, khususnya konsep *maqashid al-shari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maraknya peredaran narkoba jelas mengancam aspek jiwa dan akal, sementara ketimpangan penegakan hukum merusak tatanan keadilan yang menjadi bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, kritik terhadap kondisi tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum.

Lebih lanjut, pendekatan *masalah mursalah* memberikan ruang untuk menilai fenomena ini secara kontekstual. Karena tidak ada dalil spesifik yang mengatur kritik melalui karya seni, maka penilaian didasarkan pada dampaknya terhadap

masyarakat. Dalam hal ini, kritik terhadap bandar narkoba dan ketimpangan hukum memiliki potensi kemaslahatan karena dapat mendorong kesadaran publik dan reformasi sistem. Namun, hal ini tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan *mafsadah*.

Dalam konteks teori sosial, temuan ini juga sejalan dengan konsep bahwa seni merupakan cerminan realitas sosial. Lagu “*Siti Mawarni*” menjadi bukti bahwa karya seni mampu menjadi alat kritik yang efektif ketika saluran formal dianggap kurang responsif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi seni dari sekadar hiburan menjadi instrumen perubahan sosial, yang dalam perspektif Islam dapat diterima selama sejalan dengan nilai-nilai etika dan kemaslahatan.

Namun demikian, penting untuk menyoroti bahwa kritik yang disampaikan juga memiliki risiko. Jika narasi tentang ketimpangan hukum terus diperkuat tanpa diiringi bukti dan solusi yang konstruktif, hal ini dapat memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, yang dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori *mafsadah* yang harus dihindari.

Temuan penelitian ini juga memberikan wawasan baru bahwa pendekatan hukum Islam dapat digunakan untuk membaca fenomena budaya populer secara lebih luas. Selama ini, kajian hukum Islam cenderung fokus pada aspek normatif, namun penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena seperti lagu viral juga dapat dianalisis secara mendalam dan relevan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual.

Selain itu, penelitian ini secara tidak langsung memodifikasi pemahaman tentang *masalah mursalah* dengan menempatkannya dalam konteks kritik sosial modern. Jika sebelumnya konsep ini lebih banyak digunakan dalam kebijakan publik, kini dapat diperluas untuk menilai ekspresi budaya sebagai bagian dari dinamika sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam merespons perubahan zaman.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa kritik terhadap maraknya bandar narkoba di Sumatera Utara dan ketimpangan penegakan hukum memiliki relevansi kuat dalam perspektif *masalah mursalah*. Karya seni seperti lagu “*Siti Mawarni*” dapat menjadi sarana yang membawa kemaslahatan jika mampu mendorong keadilan dan perlindungan masyarakat. Namun, potensi *mafsadah* tetap harus diantisipasi agar kritik tidak berujung pada kerusakan sosial yang lebih besar. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral menjadi kunci dalam menilai fenomena ini dalam kerangka hukum Islam.

REFERENSI

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, and Ratna Lutfitasari. 2020. “Legal Protection Against Consumers Pt. Pln (Persero) Balikpapan Related Power Outage.” *Journal Lex Suprema* 2(1): 362–77. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/255>.
- Arianti, Farida, Akmal Bashori, Iza Hanifuddin, Abdul Mughits, Law Faculty, Universitas Sains, Al Qur, et al. 2025. “Ownership Ambiguity: A Study of Compensation for Crop Damage in Coconut Pawn Transactions in Islamic and Customary Law.” 7(3): 357–69. doi:10.15575/kh.v7i3.43793.

- Arianti, Farida, and Dian Pertiwi. 2018. "Dampak Barang Jaminan Atas Utang Piutang Di Lembaga Keuangan Dan Masyarakat Minangkabau Menurut Maqashid Syariah." (1997): 85–94.
- Aziza, Baiq, and Suci Ramadhania. 2025. "Moralitas Dalam Praktik Amar Ma ' Ruf Nahi Munkar : Menciptakan Keadilan Sosial Dalam Masyarakat Yang Toleran." 3: 417–23.
- Bramuda Pramesti Kusumaningtyas1, Rizky Abrian. 2025. "Deiksis." 17(2): 139–52. doi:10.30998/deiksis.v17i2.21480.
- Iqbal, Muhammad, and Tony Mirza. 2024. "Digitalisasi Pelayanan Publik Dalam Sektor Pelayanan Kependudukan." : 62–68.
- Irpan1, Zainuddin2, Farida Arianti*. "Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam." : 26–34.
- Latief, Mohamad, Universitas Darussalam Gontor, Ahmad Rizqon, Amir Reza Kusuma, Universitas Darussalam Gontor, and Syaikhul Kubro. 2022. "Analisis: Jurnal Studi Keislaman." 22(1): 95–110.
- Mukhlis, Hafid. "Kariman , Volume 08 , Nomor 01 , Juni 2020 | 141 Mukhlis." *Kariman* 08: 141–50.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2(2): 188–200. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.
- Santoso, Aji, Aulia Rahman Fahrudin, Adieb Aunurafiq, Agung Nugraha Putra, and Deden Najmudin. 2026. "Implementasi Asas Amar Ma ' Ruf Nahi Munkar Dalam Qanun Jinayah Aceh Implementasi Syariat Islam Di Aceh Melalui Qanun Jinayah Mencerminkan Realisasi Kesesuaiannya Dengan Kerangka Konstitusi Indonesia Sebagai Negara Hukum (Butt & Lindsey ,." (November 2025).
- Waldi, Jasri, Fitri Yeni Dalil, and Farida Arianti. 2025. "Implementation and Settlement of Land Lease Disputes in the Adat Tradition Reviewed from the Perspective of Sharia Economic Law (Study in Muaro Paneh Village , Solok Regency)." 10(December): 107–20.
- Wardana, Dirga Arif, and Hotmatua Paralian. "IMPLEMENTASI PRINSIP AMAR MAKRUUF." 22(2): 85–116
- Abdullah, Amin. 2020. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Yasa', Abu Bakar. 2021. *Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2020. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asmuni. 2021. "Maslahah dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 19(2): 145–160.
- Azra, Azyumardi. 2021. *Islam Indonesia dan Tantangan Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2020. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Effendy, Bahtiar. 2022. *Islam dan Ruang Publik*. Jakarta: Paramadina.
- Hallaq, Wael B. 2021. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harahap, M. Yahya. 2020. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2020. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Jasser Auda. 2021. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2020. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Mardani. 2021. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Munawir, Ahmad Warson. 2020. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qardhawi, Yusuf. 2021. *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Robbani Press.
- Rofiq, Ahmad. 2020. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syarifuddin, Amir. 2021. *Ushul Fikih Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah al-Zuhaili. 2020. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhdi, Masjfuk. 2021. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Haji Masagung.